

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak H. Untung Nasution, S.Ag Kasubbag. Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara beserta staf atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama peneliti melaksanakan penelitian lapangan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula kepada Ayah dan Ibunda serta Istri tercinta dan anak-anak tersayang serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2014

**Penulis**

*ALFIAN PINEM*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	7
1.6. Hipotesis .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.3. Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.....	14
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	68
3.2. Bentuk Penelitian .....	68
3.3. Populasi dan Sampel.....	68
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5. Fenomena dan Model Penelitian.....	70
3.6. Teknik Analisis Data .....	72

<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL</b>	
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
4.2. Hasil Penelitian .....	85
4.2. Pembahasan Penelitian .....	108
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	112
5.2. Implikasi Kebijakan.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>



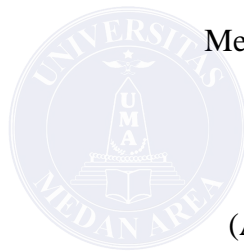
## DAFTAR TABEL

NO.TABEL	URAIAN	HAL
Tabel 4.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	85
Tabel 4.2	Distribusi Responden Menurut Umur	86
Tabel 4.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	87
Tabel 4.4	Distribusi tugas responden pada setiap bagian dalam Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	88
Tabel 4.5	Jawaban Responden Tentang Latar Belakang Pendidikan Sebagai Sumber Daya Penatausahaan Barang Milik Negara	89
Tabel 4.6	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	90
Tabel 4.7	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan wajib memiliki Sertifikat (untuk tanah), IMB (untuk gedung) dan Dokumen Kepemilikan (untuk kendaraan dan peralatan mesin lainnya) dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	91
Tabel 4.8	Jawaban Responden Tentang apakah saudara aktif dalam memberikan masukan kepada Pimpinan tentang pentingnya melengkapi dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	92
Tabel 4.9	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan wajib mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara yang sudah memiliki Dokumen Kepemilikan dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	93
Tabel 4.10	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan syarat-syarat mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	94
Tabel 4.11	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan BMN bagaimana yang status penggunaannya diusulkan Kanwil ke KPKNL dan harus melalui Sekjen Pusat dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	95
Tabel 4.12	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	96

Tabel 4.13	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan BMN yang dimanfaatkan pihak lain harus sewa kepada Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	97
Tabel 4.14	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan prosedur dan tata cara sewa Barang Milik Negara kepada pihak lain Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	98
Tabel 4.15	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan cara menghitung besarnya kontribusi sewa Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	99
Tabel 4.16	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Sewa Barang Milik Negara harus mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	100
Tabel 4.17	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Penghapusan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	101
Tabel 4.18	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Klasifikasi penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	102
Tabel 4.19	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Kelengkapan Dalam Proses Penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	103
Tabel 4.20	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	104
Tabel 4.21	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemindahtanganan/Penjualan Barang Milik Negara harus lelang atau tidak melalui lelang Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	105
Tabel 4.22	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan tata cara Penjualan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	106
Tabel 4.23	Jawaban Responden Tentang Pemberian Reward dari Pimpinan kepada Petugas Penata Usahaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara	107

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Mei 2014

(ALFIAN PINEM)